

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dari hal ini telah menunjukkan bahwa Negara Indonesia berupaya untuk berdiri kokoh dengan menjadikan hukum sebagai pondasi untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan Negara dari segala ancaman maupun bahaya baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang mengatur mengenai segala tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Sehingga hukum yang ada di Indonesia juga berfungsi untuk mengatur semua warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku sehari-hari agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum.

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi hukum pada suatu Negara hukum yang sedang berjuang untuk lebih menegakkan keadilan demi menjadi sarana pengatur tingkah laku masyarakat. Dengan adanya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen

peraturan dan pengendalian itu dapat menciptakan suasana kehidupan bersama yang tertib, teratur aman dan tenteram. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinannya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Dalam pelaksanaannya hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Upaya penegakan hukum itu tidak bisa dianggap hal yang mudah, karena dalam penegakan hukum tidak hanya menerapkan sanksi tetapi juga memikirkan sisi kemanusiaan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan:

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Tugas Pokok Kepolisian Negara RI³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat tugas umum dari kepolisian tersebut maka secara garis besarnya dapat disimpulkan menjadi dua bagian yaitu tugas dan kewajiban preventif (pencegahan) dan represif (pemberantasan).

Sehubungan dengan tugas kepolisian yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan kepolisian dalam bidang peradilan. Dalam peradilan kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai penyidik, setelah terjadi suatu tindak pidana maka polisi harus mencari dan menemukan barang bukti untuk kemudian setelah penyidik menemukan barang bukti dan cukup maka penyidik baru dapat menentukan pelaku dari tindak pidana tersebut. Setelah barang bukti ada dan pelaku tindak pidana ditemukan, penyidik kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan atau yang biasa disebut BAP, Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dijadikan dasar penuntutan dimuka persidangan.

Berawal dari tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam hal melakukan penyidikan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tugas-tugas yang bersifat represif, namun jika dihubungkan dengan keadaan saat ini banyak komentar atau pendapat dari masyarakat yang

³ *Ibid*, hal. 7.

timbul bahwa aparat kepolisian di dalam melakukan tugas penyidikan kurang efektif.

Pada saat penyidik berada di tempat kejadian perkara, ketika terjadi suatu tindak pidana maka pada saat itu penyidik mempunyai tugas-tugas penting, yang menurut Pasal 15 ayat (1) antara lain:⁴

1. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
2. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
3. Mencari keterangan dan barang bukti.

Barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik harus barang-barang yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, barang-barang tersebut meliputi:

1. Barang yang didapat dari hasil kejahatan, dan
2. Barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Tempat kejadian perkara biasanya dijadikan sebagai tempat utama untuk mencari barang bukti. Jadi di tempat itu polisi harus bersikap tegas dalam menanyai saksi-saksi yang ada terutama pelaku tindak pidana itu sendiri, jika berada ditempat itu. Polisi juga harus buka mata dan telinga untuk memperhatikan hal-hal yang ada di sekeliling tempat kejadian yang bisa memancing kecurigaan untuk mendapatkan semua data-data yang sekiranya berhubungan dengan adanya tindak pidana itu.

Meskipun pada hakikatnya polisi yang bertanggung jawab di dalam masalah proses penyidikan tersebut, namun pihak kepolisian dalam

⁴ Ibid, hal. 8.

memberantas suatu tindak pidana kejahatan yang ada ternyata masih menemukan hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kurang sigap dan cekatannya pihak kepolisian itu dalam cara kerjanya menindak lanjuti adanya kejahatan, sehingga memberikan anggapan lambannya suatu pemecahan kasus atau perkara tersebut. Pada akhirnya tidak jarang masyarakat kurang menyukai cara kerja yang dilakukan oleh polisi sehingga masyarakat dalam menyikapi jika terjadi tindak pidana yang ada di sekitar tempat tinggal mereka menyelesaikan dengan main hakim sendiri, karena masyarakat tidak puas dengan kinerja polisi.

Pada dasarnya polisi dalam menjalankan tugas penyidikan sudah mempunyai pedoman sendiri, tetapi menurut masyarakat awam kurang jelas tindakannya. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁵

Usaha- usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7-8.

menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*.⁶ Dengan demikian hal-hal tersebut bisa diketahui bahwa barang bukti dalam suatu tindak pidana merupakan salah satu hal yang penting, maka wajar jika pihak kepolisian cenderung lebih berhati-hati dalam menyidik suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul, **“UPAYA PENEMUAN DAN PENCARIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dicermati beberapa permasalahan, yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik untuk menemukan barang bukti tindak pidana?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam melakukan upaya penemuan barang bukti tindak pidana?
3. Upaya-upaya kepolisian untuk menanggulangi hambatan dalam melakukan pencarian barang bukti

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan-tujuan dan kegunaan tertentu yang sangat diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari

dan bisa membantu orang lain yang membutuhkan yang tidak mengetahui tentang ilmu hukum.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui lebih lanjut tindakan polisi dalam mencari barang bukti.
- b. Untuk mengetahui upaya polisi untuk mencari barang bukti suatu tindak pidana.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam memperoleh barang bukti.

Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan polisi untuk menemukan barang bukti suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dan masyarakat pada umumnya mengenai upaya pencarian barang bukti.

D. Kerangka Pemikiran

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terstruktur dan terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat pidana. Apabila pengumpulan alat bukti alat bukti dalam peristiwa pidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsure dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.⁷ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan;

⁷ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 1

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁹ Masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri.

Arti kepolisian lebih ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.¹⁰

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar penegak hukum (polisi) dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹¹

Dalam hal ini maka upaya yang dilakukan polis untuk mengatasi jika terjadi tindak pidana dan untuk menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut adalah dengan mencari dan menemukan barang bukti, karena barang bukti merupakan sarana penyidikan polisi yang lebih lanjut.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, hal. 19.

¹⁰ Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition, West Group. ST. PAUL. MINN, hal. 1178.

¹¹ *Loc.cit* hal. 47-48.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian salah satu unsur utama yang harus ada adalah metodologi penelitian, dalam hal ini metodologi penelitian yang penulis susun meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris. Penelitian normatif merupakan inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya untuk mencari dan menemukan asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha dalam penemuan hukum yang sesuai dengan suatu perkara tertentu.¹² Pendekatan empiris di sini dimaksudkan untuk mengkaji tentang praktik hukum di masyarakat, khususnya tentang upaya-upaya kepolisian dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti tindak pidana dan hambatan-hambatan yang ditemuinya.

2. Jenis penelitian

Bentuk kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan lengkap tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. Dan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam pencarian barang bukti.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.86.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Polres Boyolali dengan pertimbangan lokasi tersebut berada di wilayah tempat tinggal penulis.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

Sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

- a. Data Primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yaitu di wilayah Polres Boyolali.
- b. Data Sekunder pada penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, literatur, study kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku, majalah, makalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah, jurnal hukum, karya para pakar.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan, informasi dari sumber data dalam hal ini adalah penyidik kepolisian

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mencari data-data dari bahan berupa buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari beraneka macam sumber pustaka yang didapat.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³ Penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memadukan data berupa hasil interaksi dengan informan, dan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan literature yang berkaitan dengan masalah penyidikan dalam rangka mencari barang bukti, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

¹³ Lexi J.Meleong,2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosakarya, hal.103.

Dari hasil analisis penelitian berisi uraian-uraian mengenai analisa gambaran bagaimana suatu data dianalisis dan manfaat apa yang didapat dari data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bentuk analisis yang mendukung untuk penyusunan penulisan penelitian hukum diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini adalah suatu proses memilah dan memilih data-data yang digunakan untuk penulisan penelitian. Proses ini berjalan secara terus menerus sampai penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Merupakan serangkaian penyusunan data yang telah dicari dan diambil dari lapangan yang berupa tulisan untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagi peneliti penyusun sajian hasil analisis akan dengan cepat memahami isi matriknya, dan akan memepermudah yang bersangkutan untuk menarik kesimpulan.¹⁴

¹⁴ Neong Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan hukum ini untuk memberikan gambaran akan dibagi dalam empat bab yang tersusun dengan baik kedalam sub-sub bagian yang memuat pembahasan yang berbeda-beda untuk mempermudah pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terbagi dalam empat bab.

BAB I adalah Pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi yang meliputi yaitu, pengertian tindak pidana, pengertian barang bukti dan olah TKP, fungsi barang bukti dalam tindak pidana, kewenangan polisi untuk melakukan penyitaan, macam-macam alat bukti, penggeledahan.

BAB III adalah Hasil penelitian dan Pembahasan, di dalamnya dibahas mengenai upaya yang dilakukan penyidik untuk menemukan barang bukti tindak pidana, hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan upaya penemuan barang bukti tindak pidana, dan upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan dalam penacarian barang bukti itu sendiri.

BAB IV adalah berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup penulisan hukum ini.